

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Sistem Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah yaitu kegiatan mengidentifikasi, mengklarifikasi pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung kezaliman, riba, judi, penipuan barang yang haram dan membahayakan.¹

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (dianalisis), dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang meruakan media komunikasi informasi akuntansi. Transaksi bisnis disini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perubahan posisi keuangan perusahaan.²

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu organisasi syariah yang

¹Hendra Hermain, et. al., *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Medan: Madenatera Qualified publisher, 2019),h. 5.

²Hery, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Grasindo, 2015), h. 6.

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- 1). Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha:
- 2). Informasi kepatuhan organisasi syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya:
- 3). Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab organisasi syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4). Informasi mengenai tingkat keuantungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik modal dana *syirkah* temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial organisasi syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.³

Tujuan laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Suatu organisasi pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- 1). Organisasi bisnis/ komersial (swasta)

Organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya bagi pemilik. Semakin

³Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPS Tahun 2013*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2013). h. 118.

besar laba yang didapatkan oleh organisasi, bisa dikatakan organisasi tersebut semakin menarik secara finansial. Biasanya organisasi ini disebut perusahaan, baik perusahaan perorangan, persekutuan (CV), maupun perseroan terbatas (PT). secara teknis bisnis seperti ini dimiliki oleh orang atau sekelompok orang.

2). Organisasi non komersial (sektor publik)

Organisasi ini adalah organisasi yang tidak bertujuan mendapatkan laba, biasanya kegiatan lebih banyak berhubungan dengan aktivitas sosial dan pelayanan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pemerintah, partai politik, yayasan, sekolah, universitas, rumah sakit dan organisasi sejenisnya. Dari sudut pandang kepemilikan, organisasi ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat/ publik. Atas dasar itu, organisasi ini dinamakan sebagai organisasi sektor public. Kategori organisasi jenis ini, sebenarnya masih bisa diklasifikasikan lagi menjadi:

a) Lembaga pemerintahan

Organisasi yang berhubungan dengan sub klasifikasi ini adalah organisasi pemerintahan, baik pemerintah pusat dan daerah. Secara operasional, organisasi ini diselenggarakan oleh pemerintah, dengan kata lain pengelolanya adalah pemerintah dan pemiliknya adalah warga negara.

b) Lembaga Non Pemerintahan (Organisasi Nirlaba)

Organisasi yang merupakan bagian dari sub klasifikasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional organisasi ini tidak mencari laba dan juga tidak diselenggarakan oleh pemerintah, pengelolanya adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, dan pemiliknya adalah masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, kita bisa memahami bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utamanya adalah pada cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya. Organisasi bisnis memperoleh sumber daya dari modal pemilik atau setoran pemilik, sedangkan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota atau masyarakat, baik yang meningkat maupun tidak meningkat. Identifikasi perlu kita lakukan, karena pada kenyataannya, organisasi sektor publik (terutama organisasi nirlaba) juga bisa menawarkan produk/ jasa yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis.

Namun demikian, dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya dengan pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari hutang, dan kebutuhan oprasinya dari pendapatan atau jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:

- 1). Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- 2). Cara menejer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manejer.

Kemampuan organisasi nirlaba untuk terus memberikan jasa di komunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset netto, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus

menyajikan secara terpisah aset netto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset netto.

Sekilas pencatatan akuntansi pada organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini terlihat jelas bahwa aturan akuntansi organisasi nirlaba di atur sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Akan tetapi, PSAK No. 45 harus dicabut dan digantikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35. Pencabutan PSAK 45 melalui PPSAK No. 13 dimulai dari penerbitan *Eksposur Draft* (ED) tanggal 26 September 2018, di *public hearing*-kan pada tanggal 31 Oktober 2018, dan proses tanggapan public sampai tanggal 31 Desember 2018. Pada 11 April 2019 DSAK-IAI resmi mengesahkan PPSAK 13 dan mulai 1 Januari 2020 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 berlaku efektif dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tidak boleh digunakan lagi.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 diterbitkan dalam rangka memberikan panduan kepada organisasi nirlaba dalam penyajian laporan keuangan. Proses penerbitan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 bersamaan dengan proses pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 disahkan 11 April 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Perbedaan tersebut ada pada 4 hal yang perlu disesuaikan oleh organisasi sebelumnya menyajikan

Laporan Keuangan versi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 yaitu:

1). Klasifikasi Aset Neto

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 sumber daya diklasifikasikan ke dalam 3 pos yaitu aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Sedangkan di dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 hanya diklasifikasikan ke dalam 2 pos yaitu aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan.

2). Judul Laporan Keuangan

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSA)K 45 biasanya dikenal dengan istilah Laporan Aktivitas yang memuat informasi pendapatan–beban = surplus atau defisit tahun berjalan + saldo awal = saldo akhir. Sedangkan di dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 disebut Penghasilan Komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus atau deficit tahun berjalan.

3). Laporan Aset Perubahan Aset Neto

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45, Laporan Aset Neto hanya sebagai alternatif sedangkan pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan bagian dari jenis Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba.

4). Penghasilan Komprehensif Lain

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 juga mengakomodir Penghasilan Komprehensif Lain dalam penyajian laporan keuangan, terutama untuk organisasi yang menjadikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis *international Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Setelah masuknya ajaran agama Islam, kewajiban membayar zakat berdampak pada didirikannya bangunan yang secara khusus

untuk mengelola zakat (Baitulmaal). Bangunan ini pun didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. yang fungsinya sebagai lembaga penyimpanan zakat dan pendapatan lainnya yang diterima oleh negara. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW peranan Baitulmaal baru berada pada tahap penyiapan personal yang hanya menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW harta kekayaan yang diterima oleh negara langsung didistribusikan kepada yang berhak. Oleh Karena itu, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran dana Baitulmaal, dan hal yang sama berlanjut hingga ke masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq.

Perkembangan pemerintahan Islam hampir meliputi seluruh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia terjadi pada masa Umar Bin Khattab. Pada masa Umar Bin Khattab penerimaan negara meningkat secara signifikan. Kemudian kekayaan negara itu disimpan di Baitulmaal, karena hampir semua kekayaan disimpan di Baitulmaal, maka para sahabat merekomendasikan untuk perlu dibuat pencatatan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas negara. Kemudian Umar Bin Khattab mendirikan unit khusus yang bernama Diwan, yang bertugas khusus membuat laporan keuangan Baitulmaal, sebagai bentuk akuntabilitas Khalifah atas dana Baitulmaal yang sudah menjadi tanggungjawabnya.⁴

Perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga akuntansi telah dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yaitu akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi,

⁴Hendra Hermain, et. al., *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Medan: Madenatera Qualified publisher, 2019). h.38.

akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku (*auditing*). Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan itu sangat penting, karena pada masa Nabi Muhammad SAW. juga sudah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan beliau. Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah 2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵

Di dalam buku-buku Ekonomi Islam, ayat di atas dijadikan sebagai ayat akuntansi. Dwi Suwiknyo dalam bukunya *Ensiklopedi Tafsir Ayat Ekonomi*, menempatkan ayat pertama dibawah judul Akuntansi. Sebelum menafsirkan ayat di atas, terlebih dahulu penulis akan membahas pengertian akuntansi Islam. Kata yang dekat dan dapat mewakili pengertian akuntansi adalah kata *hasaba- hisab, hasibah, muhasabah dan hisaban*. Kata *hasaba* bentuknya termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Seperti dalam kalimat, “menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut”.⁶

Kata *muhasabah* secara bahasa adalah “menimbang” atau “memperhitungkan”. Pada perkembangannya terbentuklah ilmu *hisab*, sebagai cikal bakal ilmu matematika dan kadang-kadang juga disebut dengan ilmu bilangan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara menentukan plus minusnya suatu bilangan. Al-Isfahani mengartikan kata hisab dengan *isti'mal al-'adad* (mempergunakan angka-angka). Dalam banyak ayat, kata *hisab* mengacu pada arti perhitungan di akhirat dan dalam konteks rezeki, pemberian Allah yang tidak terhingga atau nikmat Allah yang tidak mungkin dihitung oleh manusia. Jelas bahwa kata akuntansi Islam dalam bahasa arab disebut dengan kata *muhasabah*. Di samping bermakna menghitung dan menimbang seperti yang telah disebutkan di atas, kata tersebut juga

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Sabiq, 2009). h. 551.

⁶Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al- Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014). h. 237 -238.

mengandung arti “mengkalkulasikan dan mendata”. Menghisab sesuatu juga bisa diartikan mendata, menyusun, dan mengkalkulasikan.⁷

b. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kerangka prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan skema yang menyeluruh dengan melalui suatu kegiatan atau fungsi utama suatu organisasi tertentu. Sistem akuntansi adalah bidang khusus akuntansi yang berhubungan dengan penciptaan suatu prosedur akuntansi dan peralatannya yang disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan.⁸ Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan (*clerical*). Yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, sehingga penyusunan dapat menjamin adanya perlakuan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.⁹ Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem ini merupakan jaringan kerja dari prosedur yang lebih menekankan urutan-urutan operasi dalam sistem.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu agar mempermudah bagi yang membuat dan menggunakan suatu sistem. Dengan kata lain, sistem adalah suatu hubungan yang berguna untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan begitu sistem dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

⁷*Ibid.*, h. 238

⁸Alfurkaniati, et. al., *Pengantar Akuntansi 1*, (Medan: Madenatera Qualified Publisher, 2017). h. 10.

⁹Beridwan, *Sistem Akuntansi Prosedur Dan Metode Edisi 5*, (Yogyakarta: BPFE, W. Gerald Cole dan Steven A. Moscove, 2002). h. 3.

¹⁰Jeperson Hutahaeon, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014). h. 1.

- 1). Sistem lingkaran terbuka adalah sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme kontrol dan tujuan.
- 2). Sistem lingkaran tertutup adalah sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme kontrol dan tujuan.¹¹

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur adalah urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.¹² Prosedur adalah metode buku untuk melaksanakan akan pekerjaan tertentu. Dalam mengembangkan prosedur, perlu terlebih dahulu mengenali sistem pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mengidentifikasi cara yang tertarik untuk melakukannya. Prosedur akan memudahkan pelaksanaan kegiatan secara terarah, teratur dan tercapainya tujuan yang diinginkan dengan baik.

Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan untuk menangani transaksi yang terjadi berulang-ulang, tercapainya dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian departemen atau lebih, dan untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka pengertian prosedur dapat disimpulkan suatu tindakan yang terjadi dalam suatu tindakan yang berhubungan dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pokok. Ada berbagai definisi mengenai sistem dan prosedur yang dikemukakan oleh berbagai tokoh, diantaranya:

- a. Sistem adalah suatu urutan jaringan yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan
- b. Prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari prosedur-prosedur yang menerangkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

¹¹Gustani, 'Pencabutan PSAK 45 Dan Penerapan ISAK 35: Dampaknya Terhadap Pelaporan Keuangan Yayasan', Dalam Gustani.ID, (Minggu,07 Februari, 2021), h.6.

¹²Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: STIE YPKPN 2009). h. 5.

- c. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan tentang sistem dan prosedur sebagai berikut:

- a. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan pola yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi utama perusahaan
- b. Prosedur adalah suatu urutan dari klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin adanya suatu penanganan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi.¹³

Pengertian sistem yang telah dikemukakan bahwa suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang disebut prosedur, sedangkan prosedur merupakan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar meliputi jenis, menggandakan jenis, menghitung, memberi kode, mendaftar mensortasi, memindahkan dan membandingkan.

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian BOS

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan standar operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dan pendidikan agar satuan pendidikan dapat

¹³*Ibid.*, h. 5

melakukan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan.

Menurut ulama ushul *fiqh*, *fiqh* adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat *amaliyah* melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama *fiqh* mendefinisikan *fiqh* sebagai sekumpulan hukum *amaliyah* yang di syari'atkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum *syara'* baik berupa perintah maupun larangan terhadap *amaliyah* manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

Adapun maksud hukum-hukum *syara'* adalah hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan dari Allah SWT. seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, dinamakan sebagai hukum taklifi biasanya bersifat perintah, anjuran dan larangan yang wajib bagi setiap mukallaf. Serta bisa juga dengan nilai sah, batal, rusak (*fasid*) yang biasa disebut dengan hukum *wadh'i* yaitu perkataan Allah SWT. yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum.

Sedangkan kata *amaliyah* mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia menjadi objek bahasan ilmu *fiqh* adalah setiap perbuatan mukallaf itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil yang terperinci adalah dalil atau sumber hukum yang mendasari perbuatan manusia, dimana dalil tersebut disyari'atkan dari dalil *naqly/nash* yang jelas yaitu Al-qur'an dan As-sunnah maupun dalil *aqly* atau dalil ijtihad dari para mujtahid. Mustafa Az-zarqa menyatakan bahwa bagian yang disepakati tersebut dinamakan sumber pokok, sedangkan bagian yang diperselisihkan dinamakan sumber sekunder. Disebut sumber sekunder karena *ijma'*,

¹⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019). h. 2.

qiyas, istihsan, istishab dan lainnya tidak dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum akan tetapi harus berlandaskan pada Al-qur'an dan As-sunnah. Jadi, *fiqh* sebagai suatu ilmu agama yang menjadi objek kajiannya adalah perbuatan manusia, dan menetapkan hukum terhadap perbuatan yang bersumber dari dalil *naqli* dan *aqli*.¹⁵

Dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara benar, rapi, tertib dan teratur. Segala prosesnya harus dilakukan dengan baik. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tidak boleh asal-asalan dan ini juga merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. As-Saff 61: 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (Q.S. As-Saff 61: 4).¹⁶

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya untuk membela diri dan kehormatan Islam dan kaum muslim dalam barisan teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik, mereka seakan-akan sedang membangun kekuatan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya.

b. Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Keberhasilan program BOS terlihat dari pengelolaan dana BOS yang baik. Penelitian ini melihat pengelolaan BOS melalui prosedur pengelolaan yang sesuai dengan petunjuk teknis BOS dari

¹⁵*Ibid.*, h. 3

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Sabiq, 2009). h. 551.

pemerintah. Selain itu, pengalokasian penggunaan Dana BOS juga harus dikelola sesuai dengan prosedur pembiayaan dana BOS yang tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan BOS. Prosedur pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang sudah sesuai petunjuk teknis BOS, maka, akan tercapai tujuan program BOS dan sekolah mampu mengelola dana BOS dengan baik sesuai dengan harapan yang akan dapat memberikan dampak bagi kualitas guru dan kualitas fasilitas sarana dan prasarana menjadi semakin baik.

1). Prosedur Dana Bantuan Operasional Sekolah

Prosedur pelaksanaan dana BOS, diawali dengan proses pendanaan pendidikan dasar. Tahapan pendanaan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal yang penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dan BOS. Prosedur yang selanjutnya adalah proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dan BOS di daerah, penyaluran dan BOS, dan pengambilan Dana BOS.¹⁷

2). Penggunaan dana BOS

Penggunaan dan BOS yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat computer.

¹⁷Kemendikbud, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

c. Tujuan dan Sasaran Dana BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Yang menjadi sasaran dari dana BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Dan dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam suatu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah selain itu maksimum penggunaan.

d. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- 1). Tim PKPS-BBM pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKP-BBM provinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dan BOS tiap provinsi.
- 2). Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi
- 3). Tim PKPS-BBM Provinsi dan tim kabupaten/kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah
- 4). Tim PKPS-BBM kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Kepala Kemenag kabupaten/kota, dan dewan pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB).

- 5). Tim PKPS-BBM kabupaten/kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM provinsi, tembusan Pos/Bank dan sekolah penerima BOS dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu mempertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun perjalanan yang berbeda.

4. Sistem Akuntansi Lembaga Pendidikan

Pengelolaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan negara jangka panjang. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam organisasi pendidikan.

Selama ini yang kita ketahui bahwa sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Dan pada saat ini sekolah diharapkan untuk memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta perhitungan biaya. Alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya.

Peranan dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah akuntansi memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan, serta menyediakan informasi kuantitatif, terutama

yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam dunia pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan pendidikan.

- a. Bagi Kepala Sekolah, akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencari tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada dibagian perlengkapan dan lain-lain.
- b. Bagi Guru dan Karyawan yang mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah) juga memiliki ketertarikan dengan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- c. Bagi orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai keberlangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah.
- d. Bagi masyarakat, institusi pendidikan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Salah satunya dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan keuangan institusi pendidikan serta rangkaian aktivitasnya.
- e. Bagi pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dana dan aktivitas sekolah.

Islam merupakan agama *rahmatat lil 'alamiin* untuk semua umat Islam. Ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah Swt. maka untuk mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. perlu adanya pendidikan agama Islam di setiap sekolah. Seiring dengan

perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari pendidikan agama Islam bisa melalui berbagai cara. Dalam hal ini, agama Islam sendiri memberikan kepada manusia secara luas untuk bisa menggunakan akal pikiran nya secara maksimal dalam memahami agama Islam itu sendiri.¹⁸

Pentingnya pendidikan juga secara tegas di anjurkan dalam agama Islam dan mendorong setiap umatnya untuk dapat memahami serta menguasai ilmu pengetahuan seperti dijelaskan dalam qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

Artinya :”...Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

Ilmu merupakan sifat wajib bagi Allah SWT, karena ini merupakan sifat wajib bagi ALLH SWT, maka keberadaan-Nya pun sangatlah khusu di sisi-Nya dan Dia Yang Maha Mengetahuui. Kekhususan yang sama juga berlaku bagi umat manusia yang diberinya ilmu. Hal ini tidak berarti menyamakan Allah SWT manusia yang “memiliki” ilmu. Karena Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Berilmu.¹⁹

Maha suci Allah SWT yang meninggikan derajat hamba-Nya yang berjalan dan berada Dalam titian ilmu. Namun demikian, janganlah kita terjebak ke dalam kebanggaan akan keilmuan yang menempel pada kita. Jangan sampai sedikit pun predikat keilmuan yang menempel pada kita membuat kita berbangga. Apalagi hanya untuk “mengadu” kepintaran. Ilmu yang dititipkan kepada kita sejatinya untuk pengetahuan yang diberikan Allah SWT sebagai

¹⁸Chuzaimah Batubara, et. al., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018). h. 1.

¹⁹Suhadi, et.al, *Tauhid & Fisika Kenyataan Fisika Dalam Kesadaran Tauhid*, (Jakarta: Prenada, 2020). h. 55.

penerang selama kita menjalani kehidupan. Bukan ilmu untuk menggurui apalagi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dengan berilmu kita tidaklah serta merta benar, karena Allah SWT adalah kebenaran yang hakiki.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Pendekatan penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rosita Dewi, 2020 ²¹	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus pada SDN 012 Tanjung Gadai Kecamatan Tebing	Deskriptif kualitatif	Bagan alir (flowchart) merupakan teknik-teknik sistem yang paling umum untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pada SD Negeri 012 Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagan alir itu sendiri diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam suatu sistem. Bagan alir yang diperlukan adalah bagian alir penerimaan dan pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus kepada sistem dan prosedur akuntansi nya saja sedangkan penelitian terdahulu nya mengenai sitem informasi dan akuntansi nya saja.

²⁰*Ibid.*, h.56.

²¹Rosita Dewi, 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada SDN 012 Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti)' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN-SUSKA Riau, 2020), h. 82.

		Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti)		(BOS), dan juga menganalisa sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 012 Tanjung Gadai Menurut PSAK 45.	
2.	Ismi Solikhatun, 2016 ²²	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)	Deskriptif Kuantitatif	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik, yaitu $x > 15$ sejumlah 78%. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 18$ sejumlah 96%	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasionalnya saja sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pengelolaan nya saja tetapi juga sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan Standak Akuntansi Keuangan.
3.	Nuraida, 2020 ²³	Sistem Pengelolaan	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan dana bantuan operasional	Penelitian sebelum nya

²²Ismi Solikhatun, 'Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta' (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 108.

²³Nuraida, 'Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 Di SD Negeri 224 Duampanua Prespektif Islam'(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare, 2020), h. 10.

		Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (Perspektif Hukum Islam)	sekolah di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang bisa dikatakan sudah akuntabilitas dalam pengelolaannya karena sudah dianggap dapat menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 224 Duampanua dalam prinsip manajemen keuangan sekolah sudah sesuai, walaupun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki lagi, sebagaimana dalam hukum Islam dalam melakukan sesuatu kita harus berlaku adil dan bertanggungjawab. Pemanfaatan atau wujud adanya dana Bantuan Operasional Sekolah oleh SD Negeri 224 Duampanua sangat membantu dalam rangka peningkatan kualitas pendidik, dan beban biaya sekolah yang mahal jadi berkurang. Selain itu juga merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dibidang pendidikan dan sudah sesuai dengan	hanya fokus dengan sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional nya sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pengelolaan saja tetapi juga membahas bagaimana sistem dan prosedur akuntansi di sekolah tersebut sudah sesuai dengan pencatatan di ISAK 35 atau belum.
--	--	--	---	--

				kebijakan dan ihsan menurut hukum islam.	
4.	Rieza Rosdiana, dkk., 2021 ²⁴	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah	Deskriptif Kualitatif	Pada Sekolah Dasar Negeri Cigalasar telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Cilagasar digunakan sesuai dengan aturan juknis yang ada dan bisa dipertanggung-jawabkan. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dana Bantuan Operasional Sekolah mengenai pendataan, pengalokasian dan pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah sudah sesuai dengan juknis yang berlaku, namun sistem informasi akuntansi di SD Negeri Cilagasar ini masih dilakukan secara manual. Dana Bantuan Operasional Sekolah penerimaan dan pengeluaran diterima serta dilaporkan setiap triwulan. SD Negeri Cilagasar melakukan pembukuan setiap bulannya secara rutin yang meliputi: buku kas	Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai Sistem informasi akuntansi dari penerimaan dana BOS sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimanakah sistem dan prosedur akuntansi sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan pencatatan yang ada di ISAK 35

²⁴Rieza Rosdiana, et. al., 'Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasioanl Sekolah', dalam *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5 (1): 2021, h. 190-192.

				umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak dan buku pembantu Bank. Komite sekolah juga melakukan pemantauan bukan hanya pada saat rapat saja melainkan melakukan pengecekan terhadap pembukuan dan juga kelengkapan bukti transaksi. Pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah agar pengelola tidak menggunakan sistem manual.	
5.	Emelia Prana Dewi, 2020 ²⁵	Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMKN 1 MINAS	Deskriptif Kualitatif	Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran dan Bantuan Operasional Sekolah sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti-bukti setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak sekolah serta dokumen yang memadai terancang dengan baik. Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMKN 1 MINAS kendala yang	Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai Sistem informasi akuntansi dari penerimaan dana BOS sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimanakah sistem dan prosedur akuntansi sekolah tersebut apakah sudah sesuai

²⁵Emelia Prana Dewi, 'Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasioanal Sekolah Pada SMKN 1 MINAS' (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN-SUSKA Riau, 2020), h. 51.

				dihadapi terdapat dalam proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah seperti sekolah penerima dan Bantuan Operasioanl Sekolah harus benar-benar mengikuti juknis yang telah diberikan oleh pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang ingin direalisasikan, aplikasi untuk melaporkan perincian dana Bantuan Operasional sering mengalami gangguan, kesenjangan antara jumlah dana Bantuan Operasioanal Sekolah yang diterima dengan besarnya kebutuhan sekolah, sistem penetapan anggaran yang berdasarkan jumlah siswa, sekolah masih dibatasi dalam pemanfaatan anggaran seperti pembangunan gedung baru yang dibutuhkan.	dengan pencatatan yang ada di ISAK 35
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

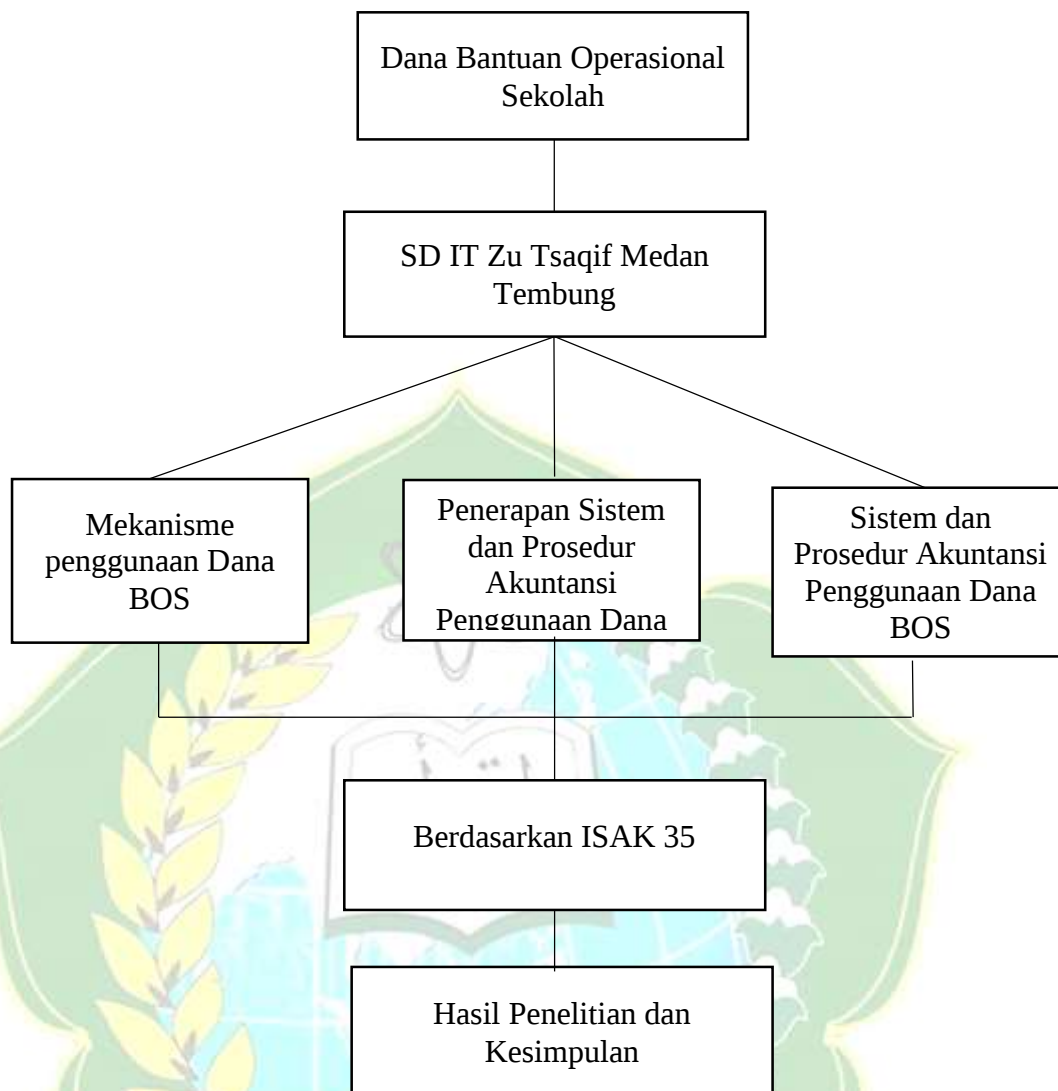
Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, Pendidikan di negeri kita ini juga masih jauh dari yang diharapkan. Dan pendidikan itu sangat penting bagi kita, karena tidak hanya memberi kita pengetahuan akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan pendidikan memupuk kita menjadi individu yang yang lebih baik, dari sebelumnya. Namun masalah yang paling jelas masih banyaknya anak anak yang masih membutuhkan pendidikan, terpaksa harus putus sekolah dikarenakan permasalahan biaya.

Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan, seharusnya pendidikan berkualitas di Negara Indonesia diselenggarakan di semua lembaga pendidikan dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang memadai. Maka tentu saja

Negara dalam hal ini Pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pada prinsipnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga yang kurang mampu terhadap mutu pendidikan yang berkualitas. Dan melalui pemberian Dana Bantuan Operasional (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya, dan mencapai cita-citanya.





Gambar 2.1
Sistem dan Prosedur Akuntansi Penggunaan Dana BOS

Kerangka berfikir yang disusun dalam penelitian ini, yaitu dimulai dengan menjelaskan dan menjabarkan mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), selanjutnya bagaimana penerapan pengelolaan Dana Bantuan Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Zu Tsaqif Medan. Kemudian dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai sistem akuntansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semestinya diterapkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Zu Tsaqif Desa Kolam Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang, dan dalam penelitian ini juga akan dijelaskan

mengenai prosedur akuntansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diterapkan. Kemudian langkah terakhir yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu memperoleh hasil penelitian serta membuat kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan.

